

2014, HK Bangun Tol Trans-Sumatera

[JAKARTA] PT Hutama Karya (HK) siap mengerjakan pembangunan tiga ruas jalan tol Trans-Sumatera pada 2014 senilai Rp 8,3 triliun. Tiga ruas itu merupakan bagian dari 22 ruas Trans-Sumatera yang harus dikerjakan HK hingga 2025, dengan kebutuhan investasi sebesar Rp 360 triliun.

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Ari Widianoro menjelaskan, saat ini manajemen tinggal menunggu keluarnya peraturan presiden tentang penunjukan langsung HK untuk menggarap ruas tol itu dan kepastian tentang adanya penyertaan modal negara (PMN). HK membutuhkan PMN sekitar Rp 5 triliun untuk tahun ini dari rencana total PMN sebesar Rp 15 triliun.

Soal pendanaan tidak

menjadi masalah. Demikian pula soal pembebasan lahan, HK menggandeng PTPN agar proyek tol ini banyak melewati lahan-lahan milik PTPN, sehingga biaya pun bisa ditekan.

"Kami siap bangun tiga ruas itu, tetapi tetap harus menunggu perpres dan penyertaan modal negara (PMN) itu keluar," ungkap Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Ari Widianoro saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (21/2).

Ketiga ruas itu adalah ruas Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, kemudian Bakuheni-Bandar Lampung, dan Palembang-Indralaya. Sedangkan, panjang 22 ruas tol keseluruhan adalah 2.696 kilometer dengan target selesai dalam 2025. Ini berarti tiap tahunnya HK

harus membangun ruas tol rata-rata 225 kilometer.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri BUMN Dahlan Iskan telah menunjuk Hutama Karya sebagai BUMN yang akan membangun jalan tol Trans-Sumatera. Dalam skenario pemerin-

tersebut, HK akan dijadikan BUMN yang khusus menangani pembangunan ruas tol yang tidak prospektif/layak secara finansial, sehingga tidak akan pernah di-go public-kan. Sedangkan, Jasa Marga tetap menjadi BUMN yang membangun ruas tol

husus yang prospektif. Ari Widianoro menjelaskan, perseroan membutuhkan payung hukum agar bisa mengerjakan ruas tol Trans-Sumatera tersebut sesuai rencana. Perusahaan juga membutuhkan dana penyertaan modal negara

4 Koridor Jalan Tol Utama Trans Sumatera

Ruas	Panjang	IRR	Estimasi investasi
Lampung-Palembang	358 km	17%	Rp 44 triliun
Palembang-Pekanbaru	610 km	13%	Rp 95 triliun
Pekanbaru-Medan	548 km	16%	Rp 64 triliun
Medan-Banda Aceh	460 km	9%	Rp 95 triliun

ANTONI

(PMN) sebesar Rp 5 triliun pada tahun ini guna meningkatkan likuiditas perusahaan.

Persetujuan

Dia menambahkan, sebelum membangun jalan tol itu, HK juga membutuhkan persetujuan dari Menteri-

an Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pembangunan jalan tol membutuhkan pula perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) untuk melihat kelayakan investor dari sisi kemampuan membangun dan pendanaan.

Payung hukum lainnya yang dibutuhkan adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol untuk mengakomodasi penunjukan langsung pemerintah terhadap BUMN untuk membangun jalan tol. Saat ini, revisi PP tersebut sudah berada di Sekretariat Kabinet. "Kalau tidak ada, basis legalnya bagi HK jadi lemah," kata Ari. Sebab, dalam PP 15/2005, pembangunan jalan tol harus dilakukan lewat tender.

Menurut Ari, saat ini

sumber pembiayaan untuk pembangunan jalan tol Trans-Sumatera masih dibahas di Kementerian Keuangan. Ada tiga opsi yang dibahas, yakni apakah pola pembangunannya menggunakan porsi 30% ekuitas dan 70% pinjaman, PMN murni, atau divestasi (selesai dibangun, ruas tol itu langsung dijual).

Dia mengaku, HK membutuhkan PMN untuk tahun ini sebesar Rp 5 triliun agar bisa mengerjakan pembangunan tiga ruas tersebut. "Nanti pada 2014 ada PMN lagi," kata dia.

UU APBN 2013 yang telah disahkan DPR-RI tidak memasukkan PMN bagi Hutama Karya, sehingga usulan tersebut kemungkinan ditampung dalam pembahasan APBN-Perubahan. [ID/M-6]